

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Wia Rizqi, Wahyudin Nor, dan M. Nordiansyah. 2015. *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 15, No. 1, hlm. 1-12.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus, Vol. 4, No. 3, hlm. 75-86.
- Hafidh, Aula Ahmad. 2013. *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, hlm. 109-120.
- KS, Lazyra. 2016. *Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Machmud, Masita, George Kawung, dan Wensy Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 2, hlm. 1-13.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Mokodompit, Paramitha Sandy, Sifrid S. Pengemanan, dan Inggriani Elim. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2, Hal. 1521-1527.
- Olivia, Grace. 2018. *Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*. <https://www.google.com/amp/amp.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbd-pada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi>. Diakses 15 Februari 2020, pukul 16.42.

- Pemerintah Indonesia. 2019. *Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. *Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saboet, Hilmy Vanoes, Erina Sudaryati, dan Djoni Budiardjo. 1992. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Anggaran pada Perusahaan Industri di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sudaryati, Erina dan Farida Amelia. 2015. *ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PROSPECTOR DAN DEFENDER (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2010-2012)*. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, Volume 1, No. 2, hlm.138-164.